

EDISI 174/TAHUN XV/MARET 2014

TROBOS

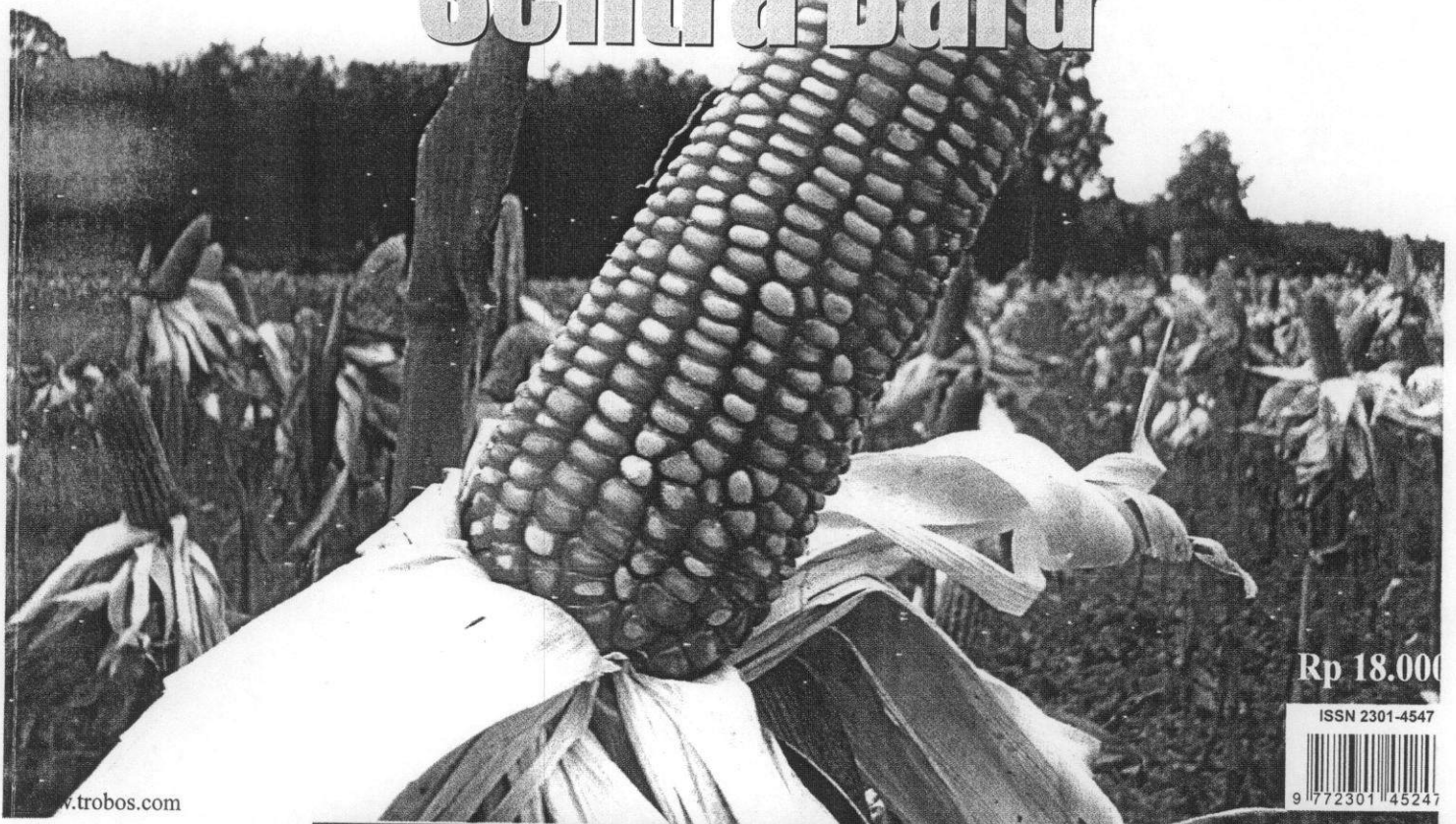
MEDIA AGRIBISNIS PETERNAKAN

Liveslock



www.ceva.c

Jagung: Menggadang Sentra Baru



Rp 18.000

ISSN 2301-4547



PT. AYAM KAMPUNG
INDONESIA

aki@cbn.net.id

Cargill®

Cargill Feed and Nutrition

collaborate > create > succeed™



Muladno

Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak
Ketua Departemen Ilmu Produksi
dan Teknologi Peternakan
Institut Pertanian Bogor

SPR Mendorong

Menjadi sarana pembe-
lajaran bagi peternak
sapi potong skala kecil
agar berwawasan lebih
baik, lebih profesional,
dan lebih cerdas seperti
peternak berkualifikasi
sarjana dalam menjalan-
kan usaha peternakannya

Sekitar 20 bulan lagi pasar bebas ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) diberlakukan di Indonesia yaitu di akhir Desember 2015. Implikasi dari kesepakatan internasional tersebut adalah keluar-masuk semua barang dan jasa ke dan dari Indonesia tidak ada hambatan apapun. Produk Indonesia dapat diekspor ke negara ASEAN dan produk dari negara anggota ASEAN dapat diimpor ke Indonesia.

Mekanisme keluar masuk barang secara bebas menuntut adanya standar tertentu yang harus disepakati seluruh negara anggota ASEAN. Yang mengejutkan, dalam acara *Indonesian Poultry Club* (IPC) di Hotel Santika TMII Jakarta (19/2) lalu, semua yang hadir tidak ada satupun yang tahu persis tentang apa standar ASEAN itu, dimana adanya, substansinya, dan lain-lain.

Hal mengejutkan berikutnya adalah tidak seorangpun dari peserta IPC menyampaikan pemikiran dan inspirasinya tentang bagaimana memanfaatkan peluang pasar bebas ASEAN bagi Indonesia untuk menguasai pasar negara ASEAN lainnya. Hal yang banyak didiskusikan adalah strategi bertahan untuk melakukan antipasi terhadap banjirnya produk negara lain ke Indonesia serta ditambah dengan berbagai protes keras terhadap pemerintah yang terkesan kurang berbuat maksimal untuk menghadapi pasar bebas 2015 nanti. Mendengar diskusi yang dihadiri banyak kalangan pengusaha, beberapa birokrat daerah, birokrat pusat, dan sedikit akademisi, pastinya masih sangat banyak pekerjaan rumah yang harus digarap secara maraton jika ingin memenangkan "pertandingan" di pasar bebas ASEAN.

Daya Saing

Terlepas dari fakta di atas, kata kunci yang sering terdengar dalam forum itu dan mutlak dilakukan adalah daya saing. Semua pelaku usaha di bidang peternakan harus berorientasi pada peningkatan daya saing. Siapapun dia dan bisnis apapun yang dikerjakannya. Harus ada upaya maksimal semua pihak untuk meningkatkan efisiensi

dan produktivitas dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Integrasi vertikal yang beberapa tahun silam tampak ditengarai sebagai bentuk lain dari monopoli usaha merupakan keniscayaan, baik bagi peiaiku usaha kecil apalagi pelaku usaha kelas kakap.

Dalam konteks peningkatan daya saing, khususnya untuk peternak sapi lokal berskala kecil yang mendominasi kepemilikan ternak di seluruh Indonesia, digagas terbentuknya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR-1111). Ide itu pertama kali saya sampaikan dalam seminar nasional di Banda Aceh pada September 2012 lalu dengan tajuk "mensarjanakan peternak berskala kecil untuk meningkatkan daya saing".

Peternak yang dimaksud di sini adalah mayoritas peternak kecil yang biasanya berpendidikan rendah, tingkat kesejahteraannya di bawah rata-rata, dan seringkali berprofesi sebagai buruh tani atau peternak penggaduh. Dengan latar belakang peternak seperti itu, istilah "mensarjanakan" bukan berarti membuat mereka akan dididik menjadi sarjana tetapi ingin membuat mereka berwawasan lebih baik, lebih profesional, dan lebih cerdas seperti peternak berkualifikasi sarjana dalam menjalankan usaha peternakannya.

Dalam perkembangannya, setelah gagasan tersebut diterapkan di 3 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, dan OKI (Ogan Komering Ilir) mulai awal 2013, namanya diubah menjadi SPR atas masukan dari rekan saya yang ahli sosiologi IPB (Institut Pertanian Bogor), Sofyan Sjaf. SPR dijalankan dengan konsep dan sistem yang belum definitif. Jadi benar-benar "*learning by doing*" yang didukung penuh oleh Asril, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan saat itu.

Kelayakan Usaha

Secara teoritis dan memang dapat dibuktikan, peternak mestinya harus memiliki sapi minimal 7-10 ekor. Ini angka yang layak secara ekonomis. Namun fakta di la-

MEMORANDUM

TO : Mr. Tolson
FROM : Mr. Clegg
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

cc: Mr. [Illegible]

Peternak Berdaulat

pangan menunjukkan, mayoritas peternak tidak sanggup memelihara sapi sejumlah itu. Umumnya mereka tidak punya tenaga untuk memberi pakan dan tidak punya lahan untuk menyediakan kandang bagi ternaknya.

Mereka akan terus bertahan dengan angka 2-3 ekor per peternak. Peternak seperti ini merupakan sasaran utama SPR. Mereka diajak untuk mau berusaha secara kolektif bersama peternak lainnya sekampung atau sedesa atau sedusun dengan menerapkan konsep SPR-1111. Caranya dengan pendampingan secara terstruktur, tersistem, dan terus menerus sampai maksimal 4 tahun. Yang diajarkan tidak hanya perihal teknis, justru yang lebih penting adalah perihal non-teknis seperti kelembagaan, bisnis, ekonomi, kepemimpinan, dan sebagainya.

Dalam satu SPR di suatu dusun atau suatu desa, minimal harus ada 1.000 ekor indukan, maksimal ada 100 pejantan, diterapkan 10 strategi berusaha secara kolektif untuk mencapai satu visi yaitu peternak berdaulat. Membentuk SPR dengan mengumpulkan 1.000 ekor induk dan maksimal 100 pejantan mungkin tidak terlalu sulit. Tantangan terberat adalah menjalankan minimal 10 strategi untuk mencapai satu visi itu. Memang berat tetapi harus dijalankan jika peternak ingin diubah nasib dan kondisi kehidupannya.

Memadukan Koperasi dan Pemuliaan

Konsep SPR-1111 untuk membangun usaha kolektif adalah memadukan prinsip koperasi plus prinsip pemuliaan ternak. Prinsip koperasi adalah membangun kekuatan ekonomi secara bersama seluruh anggota SPR.

Semua pemilik ternak yang tergabung dalam SPR bertindak sebagai anggota koperasi dan memiliki saham secara proporsional. Mereka semua mengikuti aturan yang digariskan dalam koperasi tersebut.

Yang dibisniskan tidak hanya ternak tetapi komoditas lain yang dimiliki oleh semua peternak anggota SPR. Semua

barang dibisniskan secara kolektif. Dengan prinsip koperasi ini diharapkan akan terus terjalin hubungan antar sesama anggota SPR.

Sedangkan prinsip pemuliaan ternak adalah meningkatkan potensi genetik ternak melalui upaya sistematis, terukur, dan visioner. Tidak mungkin melakukan program pemuliaan dalam populasi yang hanya puluhan ekor sapi apalagi di bawah 10 ekor seperti kebanyakan peternak miliki. Sampai kiamat, peternak berskala kecil yang punya sapi di bawah 10 ekor tidak akan dapat melaksanakan program pemuliaan sendiri.

Untuk itu, SPR menetapkan minimal harus ada 1.000 ekor betina jika ingin melaksanakan pemuliaan. Padahal kebanyakan dari mereka hanya sanggup beternak di bawah 10 ekor. Jadi satu-satunya jalan bagi peternak kecil untuk melaksanakan program pemuliaan adalah berhimpun.

Berawal dari 1.000 ekor sapi ini, pencatatan individu mulai dilakukan secara terpadu. Pemilik 1.000 ekor tadi ratusan peternak tetapi hanya ada satu database dalam setiap SPR. Sapi dikandangan di setiap peternak yang menjadi pemiliknya tetapi cara memelihara dan memperlakukan sapi dalam SPR mengikuti standar baku. Kandangannya, cara memberi pakan, formula ransum yang digunakan, dan semua pengelolaan ternak dilakukan secara seragam.

Dengan perlakuan seperti itu, kinerja setiap ekor sapi dipantau secara terus menerus dan dievaluasi setiap tahun. Ini bukan pekerjaan fisik tetapi pekerjaan intelektual sehingga pengelola data ini minimal harus berkualifikasi sarjana, dan idealnya sarjana peternakan yang memiliki latar belakang pemuliaan dan genetika ternak.

Sinergi Dengan Akademisi

Jumlah 1.000 ekor sapi betina yang dikelola dalam satu manajemen di Indonesia merupakan jumlah besar. Semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik pemerintah pusat hanya memiliki kurang dari 1.000

ekor sapi betina indukan per UPT. Jadi satu SPR lebih besar dari satu UPT dalam jumlah sapi yang dikelola.

Dengan adanya program pemuliaan ini, karena peternak tidak memiliki kapabilitas untuk itu, maka harus terjaga hubungan antara peternak dan komunitas kampus. Para akademisi dan mahasiswanya dapat pula menjadikan lokasi SPR sebagai arena penelitian dan praktikum.

Hasil penelitian dapat didedikasikan kembali kepada peternak yang tentu saja memberi keuntungan bagi peternak. Adapun akademisi dapat menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah yang tentu saja memberi keuntungan kepada akademisi tersebut.

Konsep SPR sangat baik tetapi perlu disadari juga sangat besar tantangannya. Namun itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk meningkatkan daya saing peternak.

Diharapkan seluruh akademisi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia "turun gunung" membantu jutaan peternak untuk memperbaiki dirinya. Apalagi jika ditambah peternak komoditas lainnya (di luar sapi), jumlah peternak dapat mencapai 10 juta di Indonesia.

Sementara itu, di Indonesia hanya ada sekitar 70 perguruan tinggi yang memiliki program studi peternakan dengan jumlah mahasiswa total sekitar 7.000 – 7.500 jiwa. Kondisi ini menuntut, mahasiswa dan peternak kecil harus disinergikan melalui SPR karena interaksi dua komponen ini akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

Yang menjadi pertanyaan, apakah itu semua cukup dilakukan dalam 20 bulan untuk bertanding di pasar bebas ASEAN ?, Tentu saja tidak. Namun konsep SPR mengarah ke peningkatan daya saing dan suatu saat peternak berskala kecil dapat bersaing di level ASEAN. Dukungan pemerintah, kalangan kampus, asosiasi, dan masyarakat sangat mutlak untuk menjadikan peternak lebih cerdas dan lebih berdaulat. ●TROBOS

